



---

<b>Judul</b>	: Konflik Tiga Pulau Maluku Utara Legislator Papua Ungkap Fakta Sejarah
<b>Tanggal</b>	: Jumat, 03 Oktober 2025
<b>Surat Kabar</b>	: Rakyat Merdeka
<b>Halaman</b>	: 3

### Konflik Tiga Pulau Maluku Utara

## Legislator Papua Ungkap Fakta Sejarah

ANGGOTA DPR Robert J Kardinal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak ragu menetapkan Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas masuk Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Penetapan ini penting mengingat fakta dan dokumen sejarah membuktikan bahwa tiga pulau tersebut masuk wilayah Papua.

Sebagaimana diketahui, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas berada di perbatasan antara Provinsi Maluku Utara (Malut) dan PBD. Tiga pulau ini masuk dalam wilayah Kab. Halmahera Tengah, Malut. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) PBD menggugat kepemilikan Pulau tersebut ke Kemendagri.

Robert menjelaskan, fakta-fakta dan dokumen Netherland Nieuw-Guinea tentang masalah itu tersimpan di Arsip Nasional di Belanda. "Menyatakan pulau tersebut, sebelum proklamasi, berada di wilayah Irian Barat (kini Papua Barat Daya, red). Itu klii," tegasnya, kemarin.

Dia berharap, dokumen sejarah ini dapat meluruskan kekeliruan terhadap fakta sejarah atas letak dan posisi geografis dari

tiga pulau tersebut. Pihaknya meminta Kemendagri segera memutuskan bahwa ketiga pulau itu masuk Kab. Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Tidak perlu lama-lama. Batas wilayahnya jelas. Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketiga pulau tersebut masuk dalam Netherland Nieuw-Guinea. Datanya lengkap, temasuk petanya," tegas anggota Komisi IV DPR ini.

Kemendagri, lanjutnya, mestinya tegas agar konflik antara dua provinsi paling timur Indonesia ini bisa segera redam. Apalagi belakangan ini, konflik kepemilikan tiga pulau ini telah memicu konflik di tengah-tengah masyarakat.

"Jadi tidak usah bertele-tele. Kan sama saja. Masuk Papua Barat Daya atau Papua, kan tetap dalam bingkai NKRI. Yang mana 3 pulau itu berdasarkan fakta sejarah masuk Netherland Nieuw-Guinea, sebelum akhirnya menjadi Irian Barat, kemudian menjadi Irian Jaya, Papua Barat dan kini Provinsi Papua Barat Daya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan," tandasnya.

Sementara tokoh senior ma-



Robert J Kardinal

99  
Fakta-fakta dan  
dokumen Netherland  
Nieuw-Guinea tentang  
masalah itu tersimpan  
di Arsip Nasional di  
Belanda.

syarakat Papua, Freddy Numberi menegaskan, kepemilikan tiga pulau tersebut hendaknya mengacu pada fakta sejarah. Bawa, Belanda ketika meninggalkan Irian Barat atau Tanah Papua masih dalam status quo. Hal ini berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Pemerintah Indonesia dan pihak Belanda pada 22 November 1949 lalu.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa status Irian Barat akan ditentukan melalui perundingan selanjutnya antara Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Adapun Belanda secara De Facto mengaku kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Sementara secara De Jure, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, mewakili Pemerintah Belanda pada 14 Juni 2023, secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Setelah merdeka 80 tahun, ternyata gonjang-ganjang masalah pulau-pulau antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat terus meruncing," katanya.

Freddy lalu mengungkap fak-

ta fakta sejarah kepemilikan tiga pulau tersebut. Pertama, hasil survei ke lapangan pihak Militer Belanda dalam *Verslag Van De Militaire Exploratie van Nederlandsch Nieuw-Guinea* tahun 1907-1915, bahwa Kabupaten Kepulauan Raja Ampat terpisah dari Provinsi Malut.

Laporan ini kemudian diperkuat oleh Justin Modena dan Arnoldus Johanes van Delden,

dalam ekspedisi pada tahun 1828. Di dalam laporan dua jurnalis tersebut, terungkap gambar utuh Papua terpisah dari Maluku di dalam peta tersebut.

Selain itu, ada 5 (lima) lampiran peta yang melengkapi laporan tersebut. Dari hasil analisis peta tersebut terungkap bahwa temata Nieuw-Guinea atau Irian Barat terpisah dari Maluku Utara, termasuk tiga pulau yang disengketakan tersebut, yakni masuk dalam jajaran Kabupaten Kepulauan Raja Ampat hingga sekarang.

"Kalau dilihat di peta yang keluaran Belanda tersebut. Pulau Gebe di Kabupaten Maluku Utara dan Pulau Gag di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat berjarak kurang lebih 10 mil laut," ujarnya. ■ PVB